

Revitalisasi Model Penanganan Anak Jalanan di Rumah Singgah

Hempri Suyatna

Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Yogyakarta
e-mail: hempry@yahoo.com

Abstract

The existence of a shelter actually has a strategic role for the handling of street children problems. Unfortunately, the shelter management is still conducted partially, therefore it is not effective in reducing the problem of street children. Thus, it is crucial to revitalize the model in handling street children problems. This paper offers approaches for improving the effectiveness of the shelter through the improvement in the aspects of input, process and termination. In addition, this paper also emphasizes the importance of reinforcing synergies among stakeholders in handling of street children problems.

Key Words:

street children; revitalization of the model treatment of street children; shelter

Abstraksi

Keberadaan rumah singgah sebenarnya memiliki peran strategis bagi penanganan anak jalanan. Namun sayangnya pengelolaan rumah singgah sejauh ini umumnya masih bersifat parsial sehingga tidak cukup efektif dalam mengurangi persoalan anak jalanan. Oleh karena itu, perlu ada upaya revitalisasi model penanganan anak jalanan di rumah singgah. Paper ini menawarkan pendekatan dalam meningkatkan efektivitas rumah singgah melalui pembenahan dari aspek input, proses dan terminasi. Di samping itu, paper ini juga menekankan pentingnya membangun sinergi antar *stakeholder* dalam penanganan anak jalanan.

Kata Kunci:

anak jalanan; revitalisasi model penanganan anak jalanan; rumah singgah

Pendahuluan

Permasalahan anak jalanan sepertinya tidak pernah berakhir. Program-program penanganan anak jalanan telah banyak dilakukan oleh pemerintah baik dari sisi preventif, kuratif maupun rehabilitatif, akan tetapi permasalahan anak jalanan ini tidak pernah mampu terselesaikan secara tuntas. Mati satu, tumbuh seribu begitulah ungkapan yang sepertinya tepat untuk menggambarkan masalah anak jalanan ini.

Di perempatan-perempatan, pinggir jalan, terminal, stasiun kereta api maupun pusat-pusat perkotaan masih banyak ditemukan anak-anak jalanan. Aktivitas yang mereka lakukan pun bermacam-macam dari menyemir sepatu, pemulung sampai pada tahap meminta-minta seperti mengemis maupun mengamen.

Tidak tuntasnya penanganan anak jalanan selama ini disebabkan karena beberapa hal yaitu program penanganan

anak jalanan yang selama ini dilakukan cenderung hanya bersifat parsial, tidak tepat sasaran, kurang sinergisnya penyelenggara penanganan anak jalanan baik di internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan *stakeholder* lainnya (rumah singgah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat), tidak adanya keberlanjutan dari program-program yang dilakukan dan sebagainya. Kondisi inilah yang menyebabkan program-program penanganan anak jalanan yang dilakukan tidak pernah mampu menyentuh akar persoalan.

Peran Strategis Rumah Singgah Dalam Penanganan Anak Jalanan

Mengacu pada perspektif institusional, institusi sosial yang berbeda termasuk negara, pasar dan masyarakat dapat dimobilisasi untuk mengangkat tujuan pembangunan sosial. Perspektif ini membutuhkan pemerintah untuk memainkan peran aktif dalam mengatur dan mengkoordinasikan implementasi yang berbeda. Pembangunan seharusnya secara aktif mengarahkan proses pembangunan sosial dengan cara memaksimalkan partisipasi masyarakat, pasar dan individu (Midgley, 2005: 205).

Berkaitan dengan hal tersebut, upaya penanganan anak jalanan tidak sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Akan tetapi, keberadaan organisasi-organisasi sosial seperti rumah singgah juga memiliki peran di dalamnya. Di tengah keterbatasan anggaran maupun kelemahan pendekatan penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah, keberadaan rumah singgah sangat diperlukan sebagai mitra pemerintah. Bahkan dalam beberapa hal, rumah singgah telah mampu memainkan peran penting dalam melakukan penanganan anak jalanan yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah.

Secara konseptual, ada beberapa fungsi dari rumah singgah yaitu sebagai tempat

perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan yang menimpa anak jalanan, rehabilitasi (mengembalikan dan menamakan fungsi sosial anak) dan sebagai akses terhadap pelayanan, yaitu persinggahan sementara anak jalanan dan akses kepada mereka terhadap berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Melalui rumah singgah diharapkan anak jalanan dapat mengatasi masalahnya, menemukan alternatif pemenuhan kebutuhan hidup dan menyiapkan masa depan anak jalanan sehingga menjadi masyarakat yang produktif.

Program penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh rumah singgah saat ini sebenarnya sudah sangat variatif. Program-program yang dilakukan telah menyentuh pada aspek pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, agama dan sebagainya. Untuk mempermudah reintegrasi anak jalanan ke masyarakat, rumah singgah juga telah melakukan berbagai program misalnya melalui pengupayaan identitas kewarganegaraan dan membantu pengembalian anak ke keluarga. Selama ini, akibat tidak adanya identitas kewarganegaraan seringkali membuat anak jalanan sangat rentan. Selain bekerjasama dengan pemerintah, berbagai program pemberdayaan ekonomi ini juga telah menjalin kerjasama dengan program-program *corporate social responsibility* perusahaan-perusahaan swasta.

Intensitas pendampingan dan pendekatan yang lebih mengedepankan kekeluargaan yang dilakukan oleh rumah singgah seringkali menjadi keunggulan rumah singgah dalam menangani jalanan. Adanya pendampingan yang intens ini menjadi potensi untuk menangani anak jalanan tersebut sampai pada akar permasalahannya. Pendekatan kekeluargaan rumah singgah juga memungkinkan pengelola rumah singgah dapat menyentuh

pembenahan mentalitas anak jalanan secara lebih mendalam. Dengan demikian, keberadaan rumah singgah akan mendukung efektivitas penanganan anak jalanan.

Hasil studi yang pernah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa rumah singgah yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa rumah singgah memiliki beberapa keunggulan dalam proses pemberdayaan anak jalanan. Rumah Singgah Girlan Nusantara misalnya memberikan penekanan pada pembenahan mental anak jalanan terlebih dahulu. Rumah Singgah Diponegoro juga menerapkan pola-pola kekeluargaan dalam pendampingan anak jalanan. Demikian juga dengan Rumah Singgah Anak Mandiri, Rumah Singgah Ahmad Dahlan dan Rumah Singgah Indriya-Nati yang memberikan penekanan proses pendampingan yang intens dalam penanganan anak jalanan.

Problematika Penanganan Anak Jalanan Di Rumah Singgah

Uraian di atas menunjukkan bahwa rumah singgah telah memiliki arti strategis bagi penanganan anak jalanan. Masing-masing pengelola rumah singgah ternyata telah memiliki metode tersendiri dalam program penanganan anak jalanan. Meskipun demikian, rumah singgah masih mengalami berbagai problematika dalam penanganan anak jalanan. Problematika tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua hal yaitu problem pada level kelembagaan dan problem pada level model penanganan anak jalanan.

Pada level kelembagaan dapat dilihat dari tipe rumah singgah. Rumah singgah yang ada di Indonesia sebenarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe yaitu rumah singgah yang memiliki keswadayaan/kemandirian dan rumah singgah yang masih menggantungkan pendanaan pada sumber daya pemerintah. Tipe rumah singgah kedua inilah yang akhirnya sangat

rentan untuk terus eksis. Hasil evaluasi yang pernah dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Sosial Anak, Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjukkan bahwa dari sekitar 500 rumah singgah yang ada di Indonesia ternyata tahun 2010 hanya 30-40 persen yang masih eksis di setiap propinsinya. Kecilnya subsidi anggaran dari pemerintah memang menjadi penyebab banyak rumah singgah yang harus gulung tikar dan menurun aktivitasnya. Pada saat krisis ekonomi tahun 1998 memang banyak rumah singgah yang eksis karena ada jaring pengaman sosial yang diperuntukkan untuk anak jalanan akan tetapi setelah jaring pengaman sosial dihapuskan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di rumah singgah menjadi berkurang, bahkan sebagian besar rumah singgah tidak memiliki kegiatan.

Hal tersebut juga dapat dilihat di Propinsi DKI Jakarta. Dari 31 rumah singgah yang ada di DKI Jakarta hanya 10 rumah singgah yang mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp 5 juta per tahun, padahal kebutuhan dana operasional rumah singgah mencapai Rp 150 juta per tahun. Kondisi ini sangat ironis, sebab pada tahun 1998-2002, pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp 80 juta setahun kepada setiap rumah singgah. Keterbatasan dana ini menyebabkan banyak program penanganan anak jalanan yang sudah dirancang oleh pengelola rumah singgah akhirnya tidak dapat terealisasi. Untuk mengantisipasi keterbatasan dana, beberapa rumah singgah berinisiatif mencari sponsorship/pendanaan dari berbagai pihak baik dari pihak swasta maupun donatur. Hal ini justru menyebabkan pengelola rumah singgah akhirnya sibuk dalam proses penggalangan dana dan kemudian mengabaikan fungsi substansialnya dalam menangani anak jalanan.

Selain keterbatasan dana, rumah singgah juga seringkali terbentur oleh persoalan sumber daya manusia.

Dikarenakan menjadi pekerja di rumah singgah lebih banyak unsur kerelawanan menyebabkan sumber daya manusia yang mengelola rumah singgah pun menjadi terbatas. Banyak pekerja di rumah singgah ini yang akhirnya hanya merupakan pekerjaan sampingan. Kondisi ini diperparah dimana para pekerja sosial tersebut seringkali tidak memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melakukan penanganan anak jalanan. Dari hasil pengamatan penulis, sejumlah rumah singgah di Propinsi DIY juga mengalami persoalan tersebut. Secara kuantitatif, jumlah sumber daya manusia yang mengelola rumah singgah masih minim, dan tidak semua pengelola memiliki kompetensi dalam pengelolaan rumah singgah seperti ahli psikologi, konseling dan sebagainya. Selama ini, juga tidak ada standar kompetensi terkait dengan kualifikasi pekerja sosial di rumah singgah.

Selain secara struktural menghadapi persoalan kelembagaan, program-program penanganan anak jalanan yang dilaksanakan di rumah singgah juga menghadapi berbagai kendala terkait dengan model penanganan anak jalanan. *Problem pertama* dalam model penanganan anak jalanan ini terkait dengan kontinuitas program ketrampilan yang diselenggarakan oleh rumah singgah. Program pemberian ketrampilan yang dilakukan di rumah singgah sering tidak ada tindak lanjutnya dan tidak memperhatikan keterkaitan dengan dunia kerja dan kebutuhan pasar. Keterbatasan jaringan yang dimiliki oleh pengelola rumah singgah dengan pihak pemberi kerja menjadi salah satu faktor penghambat. Stigma yang seringkali masih melekat pada anak jalanan sebagai anak yang cenderung nakal juga menyebabkan banyak pemilik pekerjaan yang enggan memanfaatkan anak jalanan sebagai pekerja. Akibatnya, program ini pun hanya berhenti saat kegiatan pemberian

ketrampilan berakhir. Anak jalanan yang telah terlatih tidak dapat tersalurkan ke pasar kerja sehingga banyak anak jalanan yang kemudian terjun di jalan lagi.

Sebenarnya beberapa rumah singgah juga sudah mulai memikirkan aspek kontinuitas ini seperti yang dilakukan Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta. Rumah singgah melakukan pola penjaminan kepada anak-anak jalanan yang ada untuk bekerja di toko-toko. Ketika anak jalanan ini melakukan kesalahan di toko tempat mereka bekerja akan mendapat jaminan dari pengasuh. Sebagai alternatif lain, beberapa rumah singgah juga mendorong anak jalanan untuk menekuni pekerjaan di sektor informal seperti bisnis jualan seluler, membuka warung dan sebagainya. Beberapa rumah singgah yang ada di Jawa Timur juga demikian. Selain melakukan kemitraan dengan pengusaha lokal, para pengelola rumah singgah juga memberikan pemberian modal bergulir bagi keluarga dan anak jalanan serta pelatihan kewirausahaan dengan mengajarkan pengembangan berbagai produk kerajinan. Namun sayangnya, program-program yang dilakukan oleh rumah singgah tersebut seringkali tidak secara serius ditekuni oleh anak jalanan. Akibatnya, inisiasi yang telah dilakukan oleh rumah singgah tersebut tidak berjalan secara maksimal. Karakter anak jalanan yang cenderung sulit diatur akhirnya menyebabkan mereka kemudian lebih senang terjun kembali sebagai anak jalanan.

Problem kedua dalam model penanganan anak jalanan, terkait dengan pola pemberian keterampilan yang tidak memperhatikan karakteristik anak jalanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sr. Tjahjorini dkk (2005) menunjukkan bahwa pembinaan di rumah singgah yang sebenarnya paling dipahami/disukai anak jalanan adalah pembinaan ketrampilan. Hal ini dikarenakan dalam pembinaan

ketrampilan, anak dapat melihat dan mempraktekan secara langsung pembinaan yang diperoleh (*learning by doing*) sehingga proses pemahaman anak akan lebih cepat dicapai. Jika anak merasa ada kegiatan yang lebih dipahami/disukai dan lebih penting bagi dirinya, maka akan mendorong anak untuk tetap berada di rumah singgah dan mengikuti pembinaan karena ingin lebih memahami kegiatan tersebut. Sebaliknya, bila anak merasa bahwa pembinaan di rumah singgah ternyata tidak memenuhi kebutuhan pokoknya untuk mengetahui dan lebih memahami suatu kegiatan pembinaan yang ada di rumah singgah, maka anak jalananpun akan acuh tak acuh dengan pembinaan yang ada. Akibat lebih lanjut anak menjadi tidak tahu pembinaan mana yang lebih dipahami/disukai dan lebih penting bagi dirinya dari keseluruhan kegiatan pembinaan yang ada.

Namun sayangnya, ketrampilan-ketrampilan yang diberikan kepada anak jalanan selama ini cenderung *digebyah uyah* (disamakan) untuk semua anak jalanan, padahal karakteristik penyebab anak jalanan berbeda satu dengan yang lainnya. Anak jalanan yang disebabkan karena faktor ekonomi tentunya akan berbeda karakternya dengan anak jalanan yang disebabkan karena faktor keluarga/budaya. Demikian juga anak jalanan yang berasal dari daerah pedesaan tentunya juga berbeda dengan anak jalanan yang berasal dari perkotaan. Oleh karena itu, Pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengatasi anak jalanan tentunya harus berbeda sesuai dengan karakteristik penyebab mereka turun ke jalan.

Keterbatasan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh rumah singgah menyebabkan mereka kemudian lebih memilih melakukan program-program yang sudah secara reguler mereka selenggarakan. Kondisi ini banyak dihadapi oleh para pengelola rumah singgah.

Tahapan *need assessment* yang seharusnya penting dalam penyusunan program seringkali tidak dilakukan. Dengan demikian, ketika anak jalanan masuk ke rumah singgah, mereka cenderung hanya menerima program-program pembinaan di rumah singgah tanpa memperhatikan latar belakang, potensi dan kebutuhan yang dimiliki anak-anak jalanan.

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh sejumlah rumah singgah di DIY maupun Jawa Timur cenderung demikian. Program-program pemberdayaan yang dilakukan pun relatif sama yaitu pemberian materi keagamaan, kesehatan, pendidikan, pelatihan kewirausahaan. Ada beberapa rumah singgah di DIY, yang mengembangkan budidaya lele atau budidaya sapi sebagai wahana ketrampilan anak jalanan, padahal sebenarnya tidak semua anak jalanan memiliki minat untuk itu.

Selain itu, hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM terhadap penanganan anak jalanan di rumah singgah di Propinsi DIY (2010: 126) menunjukkan bahwa model penanganan anak jalanan yang sering dilakukan oleh rumah singgah kadangkala justru memanjakan anak jalanan yang akhirnya menyebabkan jumlah anak jalanan terus meningkat. Hal ini, misalnya dapat dilihat pada program di rumah singgah dimana anak jalanan mendapatkan berbagai fasilitas seperti beasiswa, pelatihan ketrampilan, makanan gratis, bimbingan, rekreasi dan sebagainya. Fasilitas inilah yang seringkali justru mendorong tumbuhnya anak jalanan. Banyak orang yang datang sendiri ke rumah singgah akan tetapi sebenarnya mereka tidak dapat dikategorikan sebagai anak jalanan. Rumah singgah dilihat oleh anak jalanan sebagai peluang untuk memperoleh penghidupan dan fasilitas. Oleh karena itu, setelah mereka keluar dari rumah singgah mereka tidak

mengembangkan ketrampilan yang di peroleh sewaktu di rumah singgah, akan tetapi justru terjun kembali menjadi anak jalanan.

Pembenahan pola pikir serta sikap mental yang minder, rendah diri, merasa tidak berguna yang menyebabkan seorang anak menjadi anak jalanan juga belum diberikan porsi yang lebih. Padahal perubahan pola pikir dan sikap mental tersebut merupakan hal terpenting untuk merubah mereka menjadi lebih maju.

Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan rumah singgah kemudian menjadi semacam "surga" bagi anak jalanan. Ironisnya, tidak hanya penduduk dari daerah tersebut yang memanfaatkan fasilitas anak jalanan akan tetapi juga penduduk dari luar daerah. Di rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta misalnya ternyata sekitar 20% anak jalanan berasal dari luar Propinsi DIY. Contoh lain di Girilan Nusantara dimana penghuni rumah singgah justru berasal dari Ambon, Papua, Kediri, Malang dan Surabaya. Wawancara yang pernah penulis lakukan kepada anak jalanan juga menunjukkan bahwa sebagian dari mereka justru merasa lebih nyaman tinggal di rumah singgah daripada di rumah mereka. Bahkan secara tegas salah seorang anak jalanan yang penulis wawancarai menyatakan bahwa mereka nyaman di rumah singgah karena ada fasilitas makan maupun minum.

Banyak pengamat juga yang menyampaikan kritik bahwa model penanganan anak jalanan, seringkali tidak menyentuh kepada aspek ketrampilan. Model penanganan anak jalanan seperti ini akhirnya tidak efektif karena anak jalanan tersebut umumnya berasal dari keluarga miskin. Dalam kondisi seperti ini, orang tua cenderung akan mengeksploitasi anak untuk terjun ke jalanan untuk menambah penghasilan keluarga.

Model Penanganan Anak Jalanan Di Rumah Singgah

Bertitik tolak dari potensi dan problematika yang dihadapi oleh rumah singgah dalam penanganan anak jalanan, maka perlu ada upaya revitalisasi terhadap model penanganan anak jalanan yang selama ini dilakukan oleh rumah singgah. Model penanganan anak jalanan yang dilakukan haruslah mengacu pada tiga tujuan utama perlindungan sosial yaitu mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan, meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan dan ketidakamanan sosial ekonomi serta memungkinkan kelompok-kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat (Suharto: 2009: 42). Implementasi perlindungan sosial ini haruslah juga memiliki orientasi pemberdayaan. Orientasi pemberdayaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan peran sosial masyarakat pada *resources* tertentu (Huda, 2008:92).

Dengan demikian, secara ideal, model penanganan anak jalanan haruslah berpedoman pada prinsip bahwa penanganan anak jalanan bukan sekedar menghapus anak-anak dari jalanan melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau minimal mampu melindungi mereka dari situasi yang eksploitatif. Anak-anak jalanan misalnya, harus diberikan pendidikan dan bekal ketrampilan agar mampu memperoleh akses pada *resources*, dan bukannya digusur atau dirazia secara paksa. Upaya perlindungan bagi anak harus berpegang pada prinsip-prinsip pokok, sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak yaitu: tidak diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hidup, tumbuh dan berkembang dan menghargai pendapat dan

pandangan anak. Prinsip-prinsip dasar inilah yang harus menjadi landasan dalam melakukan pelayanan terhadap anak jalanan (Garliah, 2004).

Dengan mengacu pada prinsip di atas dan melihat berbagai kelemahan yang masih muncul dalam penanganan anak jalanan selama ini, maka perbaikan model penanganan anak jalanan merupakan hal yang harus dilakukan. Mengacu dari hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Jurusan PSDK dan Dinas Sosial tahun 2010, model penanganan anak jalanan ke depan haruslah mencakup perbaikan dalam tahapan input, proses dan output.

Tahapan Input

Pada tahapan input, aspek yang perlu diperhatikan adalah dalam proses rekrutmen anak jalanan. Proses rekrutmen anak jalanan untuk dapat masuk ke rumah singgah perlu diperketat dimana hanya anak-anak jalanan yang memiliki kemauan dan motivasi yang tinggi untuk berubah lah yang dapat masuk di rumah singgah. Jika aturan-aturan untuk masuk ke rumah singgah terlalu longgar dikhawatirkan orientasi anak jalanan memasuki rumah singgah hanya sekedar untuk mendapatkan berbagai fasilitas yang ada di rumah singgah, padahal sebenarnya esensi mereka masuk ke rumah singgah selain sebagai tempat singgah sementara juga mereka dapat memperoleh pengalaman dan bekal ketrampilan bahkan mungkin modal usaha sehingga mereka tidak terjun lagi menjadi anak jalanan. Kriteria rekrutmen anak jalanan misalnya perlu dilakukan dengan menetapkan batasan usia anak, faktor penyebab anak jalanan (anak jalanan dengan faktor tertentu seperti terlantar, terbatas ekonomi yang dapat masuk ke dalam rumah singgah). Hanya anak jalanan yang memiliki komitmen kuat untuk berubah lah yang dapat direkrut menjadi anak jalanan di rumah singgah.

Beberapa rumah singgah sebenarnya sudah memberikan kriteria untuk masuk di rumah singgah dengan batasan umur. Misalnya di beberapa rumah singgah di Jawa Timur memberikan batasan bahwa anak jalanan yang dapat masuk adalah mereka yang berada pada usia maksimal 15 tahun. Selain itu ada juga rumah singgah yang mengklasifikasikan anak jalanan pada sasaran rentan (usia dibawah 18 tahun) dan rawan (usia di atas 18 tahun). Di rumah singgah di DIY pun demikian, mereka sudah menerapkan batasan umur anak jalanan rata-rata di bawah 18 tahun. Namun, untuk kriteria-kriteria yang lain belum diterapkan oleh rumah singgah sehingga kedepannya rumah singgah dapat lebih memperhatikan aspek ini.

Tahap proses penanganan anak jalanan menjadi tahap yang paling krusial dalam penanganan anak jalanan. Keberhasilan pada tahapan ini akan menentukan terentaskannya problema anak jalanan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan proses penanganan anak jalanan ini yaitu metode pendekatan, kerjasama dan komunikasi dengan masyarakat, dan pendampingan.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam menangani anak jalanan dapat dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan akar persoalan anak terjun ke jalanan. Mereka yang menjadi anak jalanan karena faktor ekonomi akan berbeda metode pendekatannya dengan mereka yang menjadi anak jalanan karena faktor keluarga, budaya, korban kekerasan seksual dan sebagainya.

Beberapa rumah singgah di Jawa Timur sebenarnya memiliki beberapa pendekatan unggulan dalam penanganan anak jalanan seperti pendekatan religiusitas dengan sistem rujukan yakni pada pesantren, pendekatan seni dengan unggulan seni musik dan pendekatan religiusitas dengan konsep

pesantren kota. Pola-pola pendekatan yang sudah berjalan ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai *lesson learned* bagi penanganan anak jalanan yang dilaksanakan di rumah singgah lainnya.

Mengingat faktor penyebab anak jalanan saat ini lebih banyak yang disebabkan karena persoalan mental/budaya maka metode pendekatan terhadap anak jalanan pun harus berbasis pada kultural/budaya. Persoalan perbaikan mental ini menjadi faktor utama dalam penanganan masalah anak jalanan karena gejala yang ada adalah perilaku yang buruk dan mental yang rendah. Gejala ini melekat pada anak karena adanya pengaruh yang cukup kuat saat anak berada pada lingkungan jalanan yang keras, semuanya serba bebas tanpa pengontrol dan filterisasi yang jelas. Pembinaan mental yang dilakukan sebaiknya didasarkan pula pada penggalian dan pengembangan bakat anak jalanan yang ditunjang dengan pembelajaran sosialisasi serta pelayanan kesehatan sehingga diharapkan memiliki dampak positif pada pembentukan konsep diri anak jalanan.

Di samping itu, pembinaan mental dengan basis pendidikan dan pembinaan lahir dan batin akan menjadikan anak jalanan lebih siap dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar sekaligus juga mempersiapkan anak jalanan untuk dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Rumah singgah Girlan Nusantara Yogyakarta sebenarnya telah mengedepankan metode pembinaan mental dalam melakukan penanganan anak jalanan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, menyebabkan program-program pembenahan mental tersebut tidak dapat diikuti dengan pelatihan-pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan karakteristik dan latar belakang mereka.

Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan dalam rumah singgah juga harus berorientasi untuk mengubah *mindset*/pola pikir anak jalanan. Tidak ada artinya pelaksanaan program pendidikan, pelatihan dan bantuan permodalan ekonomi diberikan oleh pemerintah jika tidak diikuti dengan mengubah pandangan dan pola pikir anak jalanan. Realitas selama ini menunjukkan bahwa setelah diberikan pendidikan, pelatihan ketrampilan di rumah singgah ternyata banyak anak jalanan yang kemudian terjun lagi di jalanan. Bantuan modal usaha untuk keluarga tidak mampu acapkali tidak dapat mengubah sikap mental dan ketergantungan mereka pada bantuan. Hal ini disebabkan karena persoalan mentalitas tadi yang selama ini belum digarap secara optimal. Keberhasilan pembinaan terhadap anak jalanan juga ditentukan oleh kemampuan untuk mengubah *mindset* anak jalanan dari yang negatif menjadi positif yaitu dari anak jalanan yang merasa dirinya tidak mampu, merasa dirinya tidak berharga, merasa dirinya tak pantas bercita-cita dan merasa bebas tak punya tanggungan menjadi anak yang merasa dirinya mampu, merasa dirinya mempunyai masa depan dan merasa dirinya mempunyai tanggungan yang harus ditunaikan. Jika persoalan mentalitas ini juga bisa digarap, maka model-model represif penanganan anak jalanan seperti penggarukan terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat diminimalisir.

Metode pendekatan dalam penanganan anak jalanan haruslah juga merupakan pendekatan yang berorientasi jangka panjang. Metode yang hanya bersifat jangka pendek seperti bantuan makanan, beasiswa, peralatan permainan tidak akan mampu menyelesaikan akar persoalan yang dihadapi anak jalanan. Selain itu, kondisi demikian, justru hanya akan menjadikan rumah

singgah sebagai tempat untuk mencari fasilitas. Anak-anak jalanan hanya akan masuk ke rumah singgah sekedar untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan ketrampilan yang berorientasi pada *income generating* seharusnya menjadi arus utama dalam proses penanganan anak jalanan di rumah singgah seperti pelatihan sablon, bengkel motor, musik dan komputer. Untuk mendukung program-program pelatihan yang berorientasi ekonomi ini, maka perlu ada pengelolaan secara lebih serius terhadap unit-unit usaha yang dikelola rumah singgah. Keberadaan unit-unit usaha ini dapat menjadi tempat latihan anak jalanan dalam mengembangkan usahanya. Persoalan ini menjadi penting dikarenakan selama ini, unit-unit usaha yang ada di rumah singgah seperti peternakan, warung kecil sering mengalami kegagalan. Program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di rumah singgah harus diarahkan pada bagaimana menyiapkan anak untuk bekerja di sektor informal dan usaha kecil/menengah.

Program-program penyuluhan kesehatan reproduksi juga harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam penanganan anak jalanan di rumah singgah. Dalam pergumulan keseharian, anak jalanan khususnya anak-anak wanita jalanan tidak jarang menjadi ajang pelecehan dan kekerasan seksual, misalnya diperkosa. Setelah beranjak dewasa, mereka terjerumus ke objek-objek lokalisasi, memadati area "lampu merah", persimpangan rel kereta api dan sebagainya. Mereka ini, tidak jarang menjadi sasaran empuk bagi penderita paedofilia yaitu kelompok komunitas yang doyan menyalurkan hasrat libidonya kepada anak-anak hingga ke tingkat penganiayaan (Danim, 2006:116).

Selain itu, metode pendekatan secara psikologis juga penting dilakukan agar anak

jalanan tersebut setelah selesai mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari rumah singgah benar-benar siap diterima di masyarakat. Mutrarsi (2002:11) menjelaskan bahwa karakteristik anak jalanan seringkali memiliki emosi yang labil, cenderung agresif, rasa rendah diri, tidak dapat berempati dan kecenderungan berperilaku anti sosial. Bimbingan konseling dapat dilakukan sebagai salah satu alternatif dalam implementasi pendekatan psikologis ini. Zastrow (2004: 181) mengemukakan bahwa proses konseling haruslah mencakup beberapa aspek yaitu bagaimana membangun hubungan yang baik antara konselor dan klien, mengidentifikasi masalah anak dan muaranya adalah solusi alternatif yang dilakukan untuk mengatasi masalah anak jalanan tersebut.

Upaya mengembangkan solidaritas di antara sesama anak jalan yang ada di rumah singgah juga harus menjadi bagian penting dalam metode pembelajaran di rumah singgah. Selain itu, mereka perlu diajarkan mengenai proses pembauran dan interaksi dengan sesama, berpartisipasi dalam masyarakat dan sebagainya. Melalui metode ini diharapkan anak jalanan akan memiliki kesiapan ketika harus kembali berbaur dengan masyarakat.

Untuk mendukung metode pendekatan di atas, maka penanganan anak jalanan yang dilakukan haruslah memperhatikan beberapa hal yaitu *pertama* aspek kedisiplinan anak jalanan, *kedua* kontinuitas program penanganan anak jalanan dan *ketiga* dedikasi/profesionalisme dari pengelola rumah singgah. Dalam *aspek pertama* kedisiplinan, pengelola anak jalanan perlu menerapkan menerapkan semacam *punishment* terhadap anak jalanan yang tidak tertib, melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh rumah singgah. Dengan membiasakan anak untuk bersikap disiplin, diharapkan akan terbentuk karakter mentak anak

jalanan yang tangguh dan nantinya ketika kembali ke masyarakat dapat mematuhi berbagai aturan dan norma yang berkembang di masyarakat. *Kedua*, untuk program-program yang dirancang di rumah singgah haruslah dilakukan secara berkelanjutan antar setiap tahun. Oleh karena itu perlu ada semacam kurikulum dan panduan penanganan anak jalanan yang ada di rumah singgah sehingga program tersebut dapat berkelanjutan dan dapat tepat sasaran. *Ketiga*, dedikasi dan profesionalisme pengelola rumah singgah sangat diperlukan untuk mendukung program-program di atas. Pengelola rumah singgah harus benar-benar tahan banting, punya etos kerja yang kuat. Hal ini dikarenakan penanganan anak jalanan membutuhkan proses yang panjang. Satu tahun saja mungkin tidak cukup untuk mengentaskan anak jalanan, akan tetapi perlu proses yang cukup panjang.

Tahap Proses Penanganan Anak Jalanan

Dalam proses penanganan anak jalanan, kerjasama dengan masyarakat juga memainkan peranan yang cukup penting. Dalam realitasnya, tidak semua pengelola rumah singgah memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar. Hal ini tidak lepas dari stigma yang melekat pada anak jalanan sebagai anak nakal, sampah masyarakat dan sulit diatur sehingga mereka khawatir keberadaan rumah singgah di daerah mereka justru mengganggu kenyamanan dan ketentraman daerah mereka. Pengelola rumah singgah tampaknya juga menyadari betul hal ini sehingga mereka telah melakukan berbagai strategi untuk untuk menjalin hubungan dengan masyarakat. Hasil penelitian yang penulis lakukan di rumah singgah di DIY menunjukkan bahwa rumah singgah yang ada telah melakukan beberapa strategi untuk menjalin interaksi

dengan masyarakat dimana rumah singgah berlokasi, orang tua dari anak yang ada di rumah singgah maupun masyarakat penerima. Namun sayangnya, interaksi dengan orang tua anak jalanan seringkali juga mengalami kendala karena banyak orang tua yang telah berpisah (cerai) dan seringkali anak jalanan sendiri sudah tidak mau kembali ke orang tua mereka. Proses kerjasama dengan masyarakat penerima (daerah asal) seringkali juga terkendala karena stigma buruk yang masih melekat pada anak jalanan.

Ada beberapa kerjasama dengan elemen masyarakat yang perlu dibangun. *Pertama*, kerjasama dengan masyarakat. Menjalinkan kerjasama dan komunikasi dengan masyarakat yang menjadi sasaran program penanganan anak jalanan perlu dilakukan karena masih banyak anggapan masyarakat tentang stigma anak jalanan yang sering dianggap nakal dan mengganggu masyarakat. Hubungan harmonis dengan masyarakat ini akan bermanfaat dalam rangka mendukung keberlanjutan program-program penanganan anak jalanan yang dilakukan rumah singgah. Dalam konteks ini, masyarakat harus disadarkan bahwa anak jalanan merupakan masalah bersama sehingga pemecahan yang dilakukan haruslah menjadi tanggung jawab bersama dan masyarakat juga menjadi salah satu aktor kunci yang ikut menentukan keberhasilan penanganan anak jalanan tersebut.

Kedua, kerjasama dengan orang tua anak jalanan. Penanganan anak jalanan harus melibatkan keluarga khususnya orang tua anak jalanan. Seperti yang sudah diuraikan di atas, munculnya anak jalanan seringkali disebabkan karena faktor orang tua yang mempekerjakan anak. Dalam konteks ini, upaya yang selama ini dilakukan rumah singgah untuk melibatkan orang tua perlu lebih diintensifkan lagi agar orang tua memiliki kesadaran untuk tidak

mempekerjakan anak mereka di jalanan. Sebenarnya, setiap orang tua anak jalanan tidak ingin anaknya berkeliaran di tempat umum, sehingga jika orang tua dilibatkan dalam formulasi kebijakan penanganan anak jalanan, maka penanganan akan lebih tuntas dan tepat sasaran.

Ketiga, kerjasama dengan masyarakat penerima. Proses penanganan anak jalanan perlu mengkaitkan masyarakat penerima. Tahapan ini bermanfaat dalam proses reunifikasi anak jalanan kembali ke masyarakat. Selama ini berkaitan dengan masyarakat penerima, seringkali yang terjadi masyarakat enggan untuk menerima kehadiran seseorang yang dulunya adalah anak jalanan, sehingga menyebabkan mereka menjadi apatis dan akhirnya kadangkala mengucilkan anak jalanan. Dalam hal ini, maka masyarakat perlu disadarkan bahwa anak jalanan adalah juga menjadi bagian dari Warga Negara Indonesia sehingga mereka pun seharusnya memperoleh hak-hak yang sama untuk dapat diterima di masyarakat. Jalinan dengan masyarakat inilah yang perlu dioptimalkan sehingga mereka juga memiliki tanggung jawab yang sama dalam menangani anak jalanan. Jika perlu, masyarakat yang terlibat dalam penanganan anak jalanan dilibatkan sejak dari proses perencanaan penanganan. Dengan pelibatan mereka tersebut diharapkan penanganan anak jalanan akan lebih manusiawi dan berhasil dibandingkan dengan model penggarukan yang hanya menjadi terapi kejut sesaat.

Rumah singgah juga dapat melakukan proses pendampingan terhadap program-program yang telah diberikan kepada anak jalanan. Hal ini dilakukan karena selama ini program-program yang dilakukan pemerintah cenderung hanya berhenti ketika program pelatihan sudah selesai atau ketika bantuan peralatan sudah diserahkan sehingga banyak bantuan yang diberikan

justeru tidak dimanfaatkan oleh anak jalanan. Bahkan ironisnya, banyak anak jalanan yang justru menjual peralatan yang sudah diberikan tersebut. Akibatnya program-program penanganan anak jalanan menjadi tidak efektif.

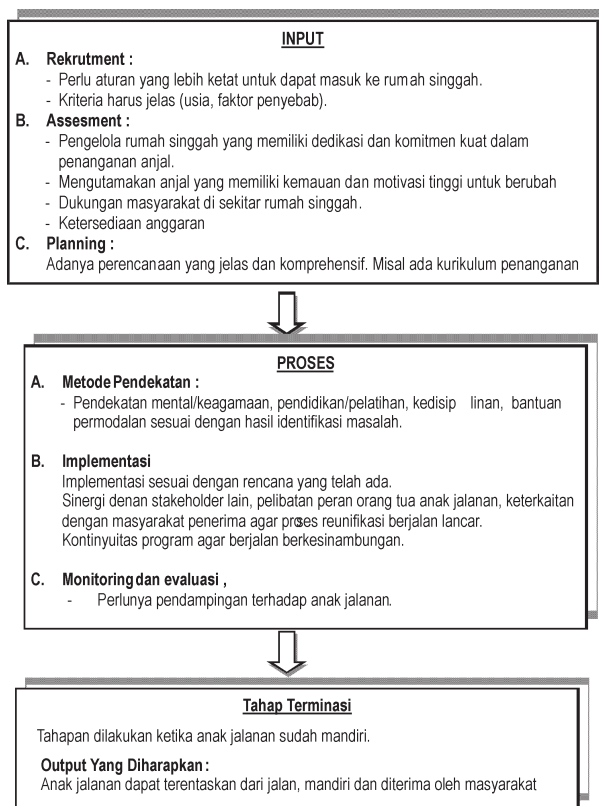
Oleh karena itu, rumah singgah dapat memainkan peran sebagai lembaga pendamping dari program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah. Rumah singgah sebenarnya telah memiliki keunggulan dalam melakukan proses pendampingan. Mereka sebenarnya telah memiliki pengalaman yang cukup terkait dengan proses pendampingan. Hubungan informal dan kekeluargaan yang dikembangkan oleh banyak rumah singgah perlu dioptimalkan. Pemerintah sepertinya perlu mengalokasikan dana ke rumah singgah untuk proses pendampingan tersebut sehingga program-program yang telah dilaksanakan dapat tetap eksis. Dengan ada subsidi dana, diharapkan pengelola rumah singgah dapat menunjuk salah satu orang yang berfungsi untuk melakukan proses pendampingan tersebut. Tahap pendampingan ini perlu dilakukan secara kontinyu sampai pada tahapan masyarakat dapat mandiri.

Tahap Terminasi

Setelah melalui tahap input dan tahap proses penanganan anak, selanjutnya adalah tahap terminasi. Tahap ini merupakan tahap “pemutusan” hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Tahapan ini dilakukan idealnya dilakukan ketika komunitas sasaran (dalam konteks ini anak jalanan) sudah dianggap mampu mandiri. Dalam konteks ini, perlu ada keseragaman mengenai indikator keberhasilan penanganan anak jalanan. Pemerintah dapat menentukan indikator keberhasilan ini dengan mendasarkan masukan dari pengelola rumah singgah. Petugas harus keluar dari komunitas secara

perlahan-lahan dan bukan secara mendadak. Hal ini perlu dilakukan agar komunitas sasaran tersebut tidak merasa ditinggalkan secara sepihak dan tanpa disiapkan oleh petugas (Adi, 2005:186). Secara lebih ringkas, model penanganan anak jalanan yang ditawarkan di atas dapat digambarkan dalam flowchart berikut ini (Dinas Sosial dan Jurusan PSDK, 2010: 130)

FLOWCHART PENANGANAN ANJAL DI RUMAH SINGGAH



Sinergitas Rumah Singgah Dengan Pemerintah Dan Stakeholder Lain

Keberhasilan penanganan anak jalanan yang dilakukan rumah singgah juga akan ditentukan adanya sinergitas antara rumah singgah dengan *stakeholder* yang lain seperti pemerintah. Selama ini, belum ada koordinasi dan kerja sama yang maksimal antara pemerintah dengan rumah singgah. Koordinasi yang ada biasanya hanya ketika

ada penyaluran dana dari dinas ke rumah singgah sementara koordinasi untuk mensinkronkan program rumah singgah dengan pemerintah seringkali tidak berjalan optimal.

Hal ini mengakibatkan program-program penanganan anak jalanan akhirnya cenderung sporadis dan tumpang tindih. Tidak adanya koordinasi antar *stakeholder* dalam penanganan anak jalanan juga menyebabkan program-program penanganan yang ada cenderung hanya parsial. Padahal keberhasilan penanganan anak jalanan di rumah singgah juga akan ditentukan oleh faktor lingkungan eksternal. Ketika lingkungan eksternal yang ada tidak kondusif dalam mendukung penanganan anak jalanan, maka persoalan anak jalanan ini tidak pernah dapat diselesaikan secara tuntas. Sebagai contoh, misalnya terkait dengan masalah sosial seperti peredaran minuman keras, narkoba dan perilaku seks menyimpang. Realitas menunjukkan bahwa anak jalanan tidak dapat lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut bahkan ketika mereka sudah tidak lagi di jalanan jalanan. Jika lingkungan eksternal tetap mendukung tumbuh suburnya masalah-masalah sosial tersebut, maka upaya-upaya pendidikan dan pelatihan kepada anak jalanan di rumah singgah hanya akan sia-sia belaka. Oleh karena itu, kerjasama dengan instansi terkait seperti kepolisian untuk memberantas masalah-masalah sosial seperti peredaran minuman keras, narkoba perlu dilakukan secara intensif. Contoh lain, juga dapat dilakukan dengan melihat keterkaitan antara program penanganan anak jalanan dengan program pengentasan kemiskinan. Selama masyarakat masih banyak yang miskin, maka masalah anak jalanan juga akan terus muncul. Data menunjukkan bahwa faktor terbesar yang menyebabkan anak jalanan adalah karena kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli yang

salah satu sasaran tujuannya untuk masyarakat rentan sebenarnya dapat disinergikan juga dengan program-program penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh rumah singgah.

Terkait dengan keterbatasan dana yang dihadapi oleh sebagian besar rumah singgah, maka pemerintah perlu memperbesar alokasi anggaran kepada mereka. Program-program penanganan anak jalanan yang disalurkan melalui rumah singgah idealnya juga tidak hanya berorientasi pada proyek semata. Mekanisme kerja yang dilakukan oleh organisasi pemerintah yang menjalankan fungsi sosial harus dikembalikan pada watak dan sifat pelayanan sosial yang mementingkan proses dan bersifat humanis daripada hasil fisik semata (Soetomo, 2008:290). Melalui perubahan mekanisme kerja ini diharapkan rumah singgah dapat menyelenggarakan pelayanan sosial dengan mengutamakan pada pengembangan kapasitas penyandang masalah sosial. Untuk mengukur keberhasilan rumah singgah yang telah mendapatkan pendanaan, maka pemerintah perlu menyusun indikator pencapaian penanganan anak jalanan yang dilakukan rumah singgah sehingga apa yang dikerjakan rumah singgah dapat terpantau secara kontinyu.

Jika pemerintah mengalami keterbatasan anggaran, maka sebenarnya mereka dapat memfasilitasi kerjasama rumah singgah dengan perusahaan-perusahaan swasta melalui program CSR-nya. Seiring dengan intensitas program CSR yang semakin tinggi maka pemerintah perlu mendorong perusahaan-perusahaan swasta agar mengalokasikan anggarannya untuk dialokasikan ke pemberdayaan anak jalanan. Selama ini sudah ada beberapa rumah singgah yang bekerjasama dengan swasta akan tetapi kerjasama yang dilakukan tersebut lebih dikarenakan banyak yang merupakan inisiasi dari rumah

singgah sendiri. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengarahkan otoritas, sumber daya dan jaringan informasi yang terkait dengan penanganan anak jalanan kepada rumah-rumah singgah tersebut.

Penutup

Keberadaan rumah singgah perlu dioptimalkan perannya sebagai ujung tombak penanganan anak jalanan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ada upaya revitalisasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, rumah singgah perlu melakukan perbaikan dalam model penanganan anak jalanan. Sedangkan dari aspek eksternal, peran pemerintah dan swasta perlu terus didorong agar rumah singgah dapat terus eksis. Sinergi diantara berbagai stakeholder ini diharapkan akan mewujudkan program penanganan anak jalanan yang lebih efektif dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Adi, Rukminto Isbandi. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial (Pengantar Pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan)*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Danim, Sudarwan. (2006). *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Sosial Propinsi DIY dan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. (2010). *Penyusunan Kajian Akademik Kajian Program Pembinaan Anak Jalanan*. Laporan Akhir Penelitian (Tidak Diterbitkan).
- Garliah. (2004). *Program Intervensi Dalam Penanganan Masalah Anak Jalanan*. Program Studi Psikologi. Universitas Sumatera Utara: Fakultas Kedokteran,

- Huda, Miftacul. (2008). *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Midgley, James. (2005). *Pembangunan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Ditperta Depag RI.
- Murtrasi. (2002). *Kekerasan Terhadap Anak dalam Among, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi DIY Edisi Ke-5 Januari-Februari*.
- Soetomo. (2008). *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. (2009). *Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Thahjorini Se, Margono Slamet, Pang S. Asngari, dan Djoko Susanto. (2005). *Persepsi Anak Jalanan Terhadap Bimbingan Sosial Melalui Rumah Singgah Di Kotamadya Bandung*. *Jurnal Penyuluhan*. Vol.1 No.1 Sepmtember 2005.
- Zastrow, Charles H. (2004). *Introduction To Social Work And Social Welfare in Eight Edition*. USA: Brooks/Cole Thomson Learning.